



DINAS SOSIAL
KOTA BLITAR

DINAS SOSIAL KOTA BLITAR

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

2022

JL. JAWA NO.64 A

Email : dinsos@blitarkota.go.id

<https://dinsos.blitarkota.go.id>

Telp : (0342) 801292 Fax. (0342) 8171744

BLITAR

KATA PENGANTAR

Rasa syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah swt Tuhan Yang Maha Esa karena atas ridho-Nya semata telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Blitar sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat pencapaian target kinerja Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2022.

Kami menyadari bahwa LKjIP ini masih jauh dari sempurna, mengingat masih banyak kendala yang dihadapi baik dalam pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya. Untuk itu saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKjIP dimasa-masa mendatang, disertai harapan semoga LKjIP ini bermanfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

Blitar, 15 Februari 2023
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BLITAR

SAD SASMINTARTI, SH, MM
Pembina Tk. I
NIP. 196601191986022002

RINGKASAN EKSEKUTIF

(Executive Summary)

Dinas Sosial Kota Blitar merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, baik perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengendalian serta monitoring dan evaluasi program dan kebijakan dalam rangka memujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan RPJMD Kota Blitar tahun 2021 – 2026, Dinas Sosial mendukung visi Walikota yaitu **“Kota Blitar KEREN, unggul, Makmur dan Bermartabat”** pada misi ketiga yaitu **“Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital”**. Dalam dokumen RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021, visi dan misi Walikota dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran RPJMD, dimana Dinas Sosial mengemban tujuan ketiga dari misi ketiga yaitu **“Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat”** pada sasaran **“Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin”** dan **“Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat”**.

Selanjutnya sasaran RPJMD tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kota Blitar yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat program dan kegiatan selama kurun waktu 2022 – 2026. Adapun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut ini :

Tujuan dan Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Tujuan : Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin Indikator : Indeks Keparahan Kemiskinan	Meningkatnya Penanganan Fakir Miskin	Persentase Fakir Miskin yang Berdaya
Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat Indikator : Persentase PMKS	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS
Tujuan : Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, setiap tahun ditetapkan target kinerja Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2022, target kinerja Kepala Dinas Sosial sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Penanganan Fakir Miskin	Persentase Fakir Miskin yang Berdaya	10%
2.	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS	1,45%
3.	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,35

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, setiap akhir tahun dilakukan pengukuran capaian kinerja dengan cara membandingkan realisasi dan target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Adapun capaian sasaran strategis/kinerja utama Dinas Sosial Tahun 2022 sebagai berikut :

Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya Penanganan Fakir Miskin	Persentase Fakir Miskin yang Berdaya	10%	15,71%	157,1%
Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS	1,45%	6,09%	420,00%
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,35	85,13	100,92%

Dari 2 indikator kinerja utama dan 1 indikator sasaran strategis, semua tercapai melebihi target. Pulihnya aktivitas masyarakat pasca pandemi

covid 19 sangat berpengaruh positif terhadap upaya pemerintah dalam penanganan PMKS khususnya fakir miskin dan berdampak terhadap perbaikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Pada tahun 2022, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Kota Blitar didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 28.344.572.837,00 dengan realisasi Rp. 27.733.174.903,08,00 atau 97,84% dengan rincian per sasaran strategis/kinerja utama sebagai berikut :

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya penanganan fakir miskin	Persentase fakir miskin yang berdaya	10%	15,71%	157,10	20.652.404.670	20.169.171.952	97,66
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					20.652.404.670	20.169.171.952	97,66
Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS	1,45%	6,09%	420,00	3.033.158.982	2.983.078.396	98,35
Program Pemberdayaan Sosial					1.486.569.172	1.478.463.606	99,45
Program Rehabilitasi Sosial					992.064.800	975.294.980	98,31
Program Penanganan Bencana					468.898.850	445.773.700	95,05
Program Pengelolaan TMP					85.535.160	83.546.100	97,67
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	84,35	85,13	100,92	4.659.009.185	4.580.924.555,08	98,32
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota					4.659.009.185	4.580.924.555,08	98,32
	JUMLAH				28.344.572.837	27.733.174.903,08	97,84

Adapun tingkat efisiensi sebagaimana tabel berikut :

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya penanganan fakir miskin	Persentase fakir miskin yang berdaya	157,10%	97,66%	1,61
2	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS	420,00%	98,35%	4,27
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	100,92%	98,32%	1,03

Dari tabel di atas dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2022 dari 3 indikator sasaran strategis/kinerja utama semua dikategorikan efisien.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang.....	1
B Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C Maksud dan Tujuan.....	5
D Dasar Hukum.....	6
E Aspek-aspek Strategis.....	8
F Isu Strategis	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A Rencana Strategis 2021-2026	12
B Perjanjian Kinerja Tahun 2022	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran	
1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022	16
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2022	19
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra	21
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)	22
B Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)	19
1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	24
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	24
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25
C Prestasi/Penghargaan	26

BAB IV PENUTUP

A Kesimpulan	28
B Langkah Perbaikan	29

LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Strategis OPD Tahun 2021 – 2026
2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022
3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2022

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja Tahun 2022	17
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2022	20
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	21
Tabel 3.4	Pencapaian Kinerja SPM Tahun 2022	
Tabel 3.5	Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2022 ...	24
Tabel 3.6	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	25
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022 ..	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu pasal dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja dipergunakan sebagai :

1. Sarana/instrumen penting untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;

2. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat asas (konsisten);
3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan;
4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja;
5. Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.
6. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
7. Sebagai upaya untuk perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor : 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, struktur organisasi Dinas Sosial Kota Blitar sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA BLITAR



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AHMAD TOBRONI, S.H.
NIP. 19670909 199803 1 008

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial Kota Blitar melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- 2) Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang sosial;
- 3) Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- 4) Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan bidang sosial serta pelayanan umum di bidang sosial;
- 5) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial;
- 6) Penyusunan dan pelaksanaan pemberdayaan sosial;
- 7) Perumusan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi kebijakan rehabilitasi sosial;
- 8) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial;
- 9) Penyusunan kebijakan dan pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- 10) Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
- 11) Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- 12) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sesuai dengan kewenangan Daerah;
- 13) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

- 14) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 15) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- 16) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial;
- 17) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang sosial secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- 18) Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang sosial; dan
- 19) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Sosial Kota Blitar pada Tahun 2022, dengan tujuan:

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju

pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Blitar ini disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022;

17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2022 nomor 66);
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar nomor 48 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026.

E. Aspek – Aspek Strategis

Sebagai dinas yang menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Sosial, Dinas Sosial melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial serta Pemberdayaan Sosial untuk mendukung keberhasilan pembangunan sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMD 2021 – 2026. Arah strategis dan kebijakan Dinas Sosial Kota Blitar menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial di Kota Blitar dalam

mendukung misi ke 3 Kota Blitar yaitu “Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital” pada tujuan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan RPJMD tersebut, ditetapkan tujuan Dinas Sosial yaitu menurunkan ketimpangan antar penduduk miskin dan meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, dengan sasaran strategis meningkatnya penanganan fakir miskin dan meningkatnya penanganan PMKS.

Penanganan fakir miskin dan PMKS/PPKS dilakukan antara lain melalui pelayanan sosial yang bertujuan memberikan pertolongan, bimbingan, perlindungan kepada individu, keluarga, masyarakat agar dapat melaksanakan fungsi sosial dengan baik. Karena itu, penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat memperluas jangkauan pelayanan dan lebih berkualitas. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan. Disamping itu upaya penguatan kapasitas sumber daya PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) sebagai garda depan pelayanan social perlu terus ditingkatkan.

F. Isu-Isu Strategis

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diupayakan untuk memperbaiki fungsi sosial PMKS/PPKS sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya, menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungannya secara wajar dan bermartabat. Pulihnya aktivitas masyarakat pasca pandemi covid 19 berdampak terhadap perbaikan

kehidupan social ekonomi yang sempat terpuruk selama kurun waktu dua tahun. Angka PMKS/PPKS tahun 2022 turun sebesar 6,09% dari tahun 2021. Namun karakteristik PMKS/PPKS cenderung memiliki mobilitas sosial yang dinamis, sering berpindah-pindah sehingga jumlahnya selalu berubah dan tidak akan pernah habis. Sebaran PMKS dengan segala permasalahannya di Kota Blitar tahun 2022 masih tergolong tinggi yaitu sebanyak 11.733 tentunya memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Angka ini didominasi oleh kelompok fakir miskin yang mencapai 10.650 jiwa. Tingkat kemandirian fakir miskin belum sesuai harapan karena kurangnya motivasi dan rasa percaya diri untuk merintis usaha serta kendala permodalan dan akses pemasaran hasil usaha. Sinergitas program penanganan fakir miskin dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menuntut meningkatnya kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Rehabilitasi sosial bagi PMKS dengan gangguan keterlantaran, kecacatan, dan ketunasanusiaan memerlukan peningkatan kualitas pemberi layanan terutama PSKS sebagai ujung tombak pelayanan sosial di masyarakat. Keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan sosial bagi PMKS yang memerlukan layanan lanjutan. Kondisi ini tidak didukung oleh sarana prasarana pelayanan sosial skala provinsi yang memadai baik kapasitas maupun persebarannya, sedangkan di Kota Blitar hanya ada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak yang tentunya jangkauan pelayanannya sangat terbatas. Keberadaan shelter PMKS sebagai tempat singgah sementara bagi PMKS terlantar sebelum mendapatkan layanan rujukan lanjutan belum didukung sarana prasarana maupun SDM pengelola yang memadai. Dari uraian permasalahan tersebut maka ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial masih cukup tinggi;
2. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas SDM Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Belum maksimalnya pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
4. Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial bagi PMKS terlantar.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar nomor 48 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kota Blitar yang merupakan penjabaran dari visi dan misi RPJMD Kota Blitar sebagai berikut :

Visi	Kota Blitar KEREN, Unggul, Makmur dan Bermartabat
Misi	Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital
Tujuan RPJMD	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat

Sasaran RPJMD	1. Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin 2. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat		
Tujuan Renstra	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	Meningkatnya penanganan fakir miskin	Peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan PMKS	Optimalisasi pelatihan dan pemenuhan kebutuhan dasar
			Pemberian program sosial ekonomi bagi warga miskin dan rentan miskin
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya penanganan PMKS	Peningkatan upaya rehabilitasi dan jaminan sosial	Peningkatan PMKS yang direhabilitasi, diberdayakan dan menerima Jaminan Sosial
			Peningkatan validasi data PMKS
		Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Peningkatan pendampingan pekerja sosial
			Peningkatan kapasitas PSKS
		Peningkatan manajemen pengelolaan TMP	Peningkatan sistem keamanan dan kebersihan TMP
Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah	Penyempurnaan penyusunan dan penerapan dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Adapun matrik Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2021 – 2026 secara lengkap tertuang pada lampiran I LKjIP ini.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja disusun sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi juga sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial tahun 2022 disusun berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan perubahan sesuai dengan pedoman baru yang memuat sasaran strategis berikut indikator kinerja dan targetnya.

Secara lengkap Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2022 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KET
1	2	3	
Meningkatnya penanganan fakir miskin	Persentase fakir miskin yang berdaya	10%	IKU OPD
Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS	1,45%	IKU OPD
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	84,35	Indikator sasaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan secara periodik, antara lain memuat pengukuran capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/SASARAN

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mengemban visi dan misi Walikota Blitar yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026, setiap akhir tahun dilakukan pengukuran capaian kinerja/sasaran Dinas Sosial Kota Blitar. Analisa capaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dan perbandingan kinerja terhadap target akhir periode Renstra sebagaimana berikut :

1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022

Dinas Sosial Kota Blitar telah menetapkan 3 Sasaran Strategis beserta targetnya untuk dicapai pada Tahun 2022. Capaian Kinerja terhadap sasaran strategis selama Tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
Meningkatnya penanganan fakir miskin	Persentase fakir miskin yang berdaya	10,00%	15,71%	157,10%
Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS	1,45%	6,09%	420,00%
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	84,35	85,13	100,92%

Sasaran strategis meningkatnya penanganan fakir miskin merupakan kinerja utama Dinas Sosial dengan indikator persentase fakir miskin yang berdaya. Indikator ini dicapai dengan cara membandingkan jumlah peserta pelatihan yang sudah bekerja/merintis usaha dengan jumlah peserta pelatihan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan, dari jumlah peserta pelatihan sebanyak 70 orang, terdata sebanyak 11 orang yang telah mulai merintis usaha mandiri. Dari target 10% terealisasi sebesar 15,71%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 157,1%, kategori **SANGAT BERHASIL**. Program/kegiatan pelatihan keterampilan bagi fakir miskin yang disertai Bantuan Sosial peralatan usaha sesuai jenis pelatihannya merupakan upaya awal yang paling efektif untuk mendukung terbentuknya wirausaha baru pasca pelatihan. Namun kurangnya motivasi, rasa percaya diri dan kendala pemasaran masih sering dijumpai sehingga belum semua alumni peserta pelatihan mempunyai rintisan usaha. Untuk itu diperlukan pendampingan/motivasi usaha dan fasilitasi akses pemasaran melalui sinergi OPD/stake holder terkait.

Sasaran strategis meningkatnya penanganan PMKS juga merupakan kinerja utama dengan indikator persentase penurunan PMKS. PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Dapat disampaikan bahwa tahun 2022 terjadi penurunan PMKS/PPKS sebesar 6,09% dari tahun sebelumnya. Jumlah PMKS tahun 2021 sebanyak 12.494 jiwa dan tahun 2022 sebanyak 11.733 jiwa. Target kinerja persentase penurunan PMKS tahun 2022 sebesar 1,45% dengan realisasi 6,09% dan capaian kinerja 420%, sehingga dikategorikan **SANGAT BERHASIL**. Dari 26 jenis PMKS, penurunan terbesar terdapat pada angka fakir miskin yaitu sebesar 5,44% dari PMKS, sisanya dari kategori korban bencana alam, Orang Dengan HIV/Aids (ODHA), korban penyalahgunaan Napza, bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, pemulung, anak yang memerlukan perlindungan khusus, tuna susila, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak dengan kedisabilitas, anak jalanan, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan anak Balita terlantar. Normalnya kembali aktivitas masyarakat pasca pandemi covid 19 telah mendorong pulihnya kehidupan sosial ekonomi. Hal ini berpengaruh positif terhadap upaya pemerintah dalam penanganan masalah sosial guna menurunkan angka PMKS/PPKS khususnya fakir miskin. Upaya Rehabilitasi Sosial merupakan salah satu upaya untuk menangani masalah PMKS agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan bermartabat yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Blitar yang bersinergi dengan OPD terkait baik jajaran Pemerintah Kota Blitar maupun kabupaten/kota lain, Dinas Sosial Provinsi, Kementerian Sosial, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sebagai ujung tombak pelayanan sosial PMKS juga

peran serta masyarakat sekitar. Namun karakteristik PMKS/PPKS cenderung memiliki mobilitas sosial yang sangat dinamis, sering berpindah-pindah sehingga jumlahnya selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu dan tidak akan pernah habis sehingga angkanya cenderung fluktuatif. Perubahan kondisi lingkungan yang sangat mendadak dan kurang mendukung sangat berpengaruh terhadap munculnya permasalahan-permasalahan sosial yang menimbulkan adanya PMKS-PMKS baru. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan jejaring kerja sama dan sinergi antar OPD, Kab/Kota lain, Dinas Sosial Provinsi, Kementerian Sosial maupun pilar-pilar sosial dalam penanganan PMKS. Peningkatan kapasitas PSKS sebagai ujung tombak layanan sosial pada tahap awal melalui pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan kesejahteraan sosial secara kontinyu penting dilakukan.

Sasaran meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan indikator nilai SAKIP perangkat daerah terealisasi sebesar 85,13. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 84,35 maka telah tercapai sebesar 100,92% dengan kategori **SANGAT BERHASIL**. Komitmen pimpinan, kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja merupakan faktor pendukung implementasi SAKIP pada suatu OPD. Namun disisi lain implementasi SAKIP belum menjadi kepedulian pada seluruh ASN. Untuk itu diperlukan sosialisasi kepada seluruh ASN untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap implementasi SAKIP.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022

Perbandingan realisasi sasaran kinerja Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2021-2022 disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
		2021	2022	2021	2022
Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase fakir miskin yang berdaya	10,00%	10,00%	21,05%	15,71%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan bagi PMKS	Persentase penurunan PMKS	1%	1,45%	-2,38%	6,09%
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	-	84,35	84,31	85,13

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa realisasi IKU persentase fakir miskin yang berdaya tahun 2022 menurun sebesar 5,34 point persen dari tahun 2021, namun sudah melebihi target yang ditetapkan. Beragamnya latar belakang, karakter dan pola pikir peserta pelatihan berpengaruh terhadap minat dan motivasi diri untuk merubah kehidupan agar menjadi lebih baik lagi melalui rintisan usaha mandiri. Oleh karena itu motivasi untuk meningkatkan rasa percaya diri, pendampingan dengan melibatkan tenaga ahli dibidang kewirausahaan perlu diupayakan untuk mendorong tumbuhnya wirausaha-wirausaha baru dari alumni pelatihan keterampilan yang telah dilaksanakan. Sedangkan IKU persentase penurunan PMKS naik sebesar 8,47 point persen dari tahun 2021. Pulihnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat pasca pandemi 19 mendorong turunnya angka kemiskinan yang merupakan mayoritas PMKS. Indikator sasaran nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan

indikator baru pada Renstra periode 2021-2026, sehingga target kinerja tahun 2021 belum ditetapkan. Apabila disandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, Nilai SAKIP perangkat daerah tahun 2022 naik 0,82 point dari tahun 2021 yaitu 84,31 menjadi 85,13.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi sasaran kinerja Dinas Sosial Kota Blitar sampai dengan akhir periode Renstra disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2022	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase fakir miskin yang berdaya	10,00%	15,71%	157,1%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan bagi PMKS	Persentase penurunan PMKS	5,89%	6,09%	103,4%
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	84,51	85,13	100,73%

Berdasarkan tabel diatas, tingkat kemajuan capaian IKU persentase fakir miskin yang berdaya pada tahun 2022 sebesar 157,1% atau telah melebihi target akhir periode Renstra. Target IKU

ini ditetapkan terpisah setiap tahunnya dan bukan merupakan target akumulatif sehingga perhitungan setiap tahun dilakukan pada sasaran yang berbeda pula. Tingkat kemajuan capaian IKU persentase penurunan PMKS terhadap target periode Renstra sebesar 103,4% atau dikategorikan telah tercapai melebihi target. Sedangkan tingkat kemajuan indikator kinerja nilai SAKIP perangkat daerah sebesar 100,73% atau target periode Renstra telah tercapai di tahun 2022.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM, Dinas Sosial Kota Blitar juga mengemban amanah dalam pencapaian SPM layanan dasar urusan sosial. Secara umum penerapan SPM bidang sosial tercapai sesuai target yang ditetapkan. Realisasi kinerja Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2022 terhadap target SPM urusan sosial sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja SPM Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kab/Kota	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	100%	100%

Dari tabel diatas dapat digambarkan semua target indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang sosial tercapai 100%. Pelayanan SPM bidang sosial merupakan pelayanan yang bersifat lintas sektoral sehingga tidak bisa dilakukan oleh Dinas Sosial saja tetapi perlu dukungan dan kerja sama dengan OPD, stake holder terkait, keluarga dan masyarakat bahkan tidak menutup kemungkinan bersinergi dengan kabupaten/kota lain, provinsi maupun Kementerian Sosial. Kerja sama dengan pihak-pihak terkait secara kontinyu telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Blitar dan terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan SPM bidang sosial secara paripurna.

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)

Keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah tentunya tidak terlepas dari dukungan pendanaan yang memadai baik yang mendukung secara langsung maupun yang bersifat penunjang program/kegiatan. Pengukuran kinerja keuangan per sasaran pada Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2022 sebagai berikut :

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Dukungan anggaran untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5

Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase fakir miskin yang berdaya	20.652.404.670	72,86
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan bagi PMKS	Persentase penurunan PMKS	3.033.158.982	10,70
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	4.659.009.185	16,44
	Jumlah		28.344.572.837	

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Dari anggaran yang disediakan, capaian kinerja dan anggaran per sasaran kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya penanganan fakir miskin	Persentase fakir miskin yang berdaya	10%	15,71%	157,10	20.652.404.670	20.169.171.952	97,66
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					20.652.404.670	20.169.171.952	97,66
Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS	1,45%	6,09%	420,00	3.033.158.982	2.983.078.396	98,35
Program Pemberdayaan Sosial					1.486.569.172	1.478.463.606	99,45
Program Rehabilitasi Sosial					992.064.800	975.294.980	98,31
Program Penanganan Bencana					468.898.850	445.773.700	95,05
Program Pengelolaan TMP					85.535.160	83.546.100	97,67
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	84,35	85,13	100,92	4.659.009.185	4.580.924.555,08	98,32
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota					4.659.009.185	4.580.924.555,08	98,32
	JUMLAH				28.344.572.837	27.733.174.903,08	97,84

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2022 disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya penanganan fakir miskin	Persentase fakir miskin yang berdaya	157,10%	97,66%	1,61
2	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS	420,00%	98,35%	4,27
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	100,92%	98,32%	1,03

Efisiensi diperoleh dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian keuangan. Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 terjadi efisiensi anggaran. Faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi anggaran tersebut adalah persentase realisasi capaian sasaran dan persentase realisasi anggaran. Realisasi capaian sasaran yang tinggi dan realisasi anggaran yang rendah akan diperoleh pelaksanaan anggaran yang efisien.

B. Prestasi/Penghargaan

Dalam menjalankan amanahnya Dinas Sosial juga melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanan sosial, antara lain Sosial Home Care (SHC) yaitu layanan sosial bagi Lansia terlantar yang meliputi layanan kebersihan diri dan tempat tinggal, pemeriksaan kesehatan, bimbingan psikis, mental dan sosial. Kegiatan ini dilaksanakan dan berkolaborasi

dengan Dinas Kesehatan, TSKS, PSM, kecamatan/kelurahan juga dengan lingkungan sekitar. Pada tahun 2022 SHC ini dikompetisikan pada ajang Innovative Government Award (IGA) tingkat Pemerintah Kota Blitar dan berhasil meraih juara I.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Sosial Kota Blitar atas penyelenggaraan Rencana Kerja selama tahun 2022. Secara umum keseluruhan program kerja dan kegiatan dapat terlaksana dengan lancar sesuai rencana kerja dan jadwal yang disusun. Secara keseluruhan indikator sasaran kinerja tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, bahkan melebihi target. Sedangkan capaian dari masing-masing indikator kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Persentase fakir miskin yang berdaya	10,00%	15,71%	157,10%	Sangat berhasil
2.	Persentase penurunan PMKS	1,45%	6,09%	420,00%	Sangat Berhasil
3.	Nilai SAKIP perangkat daerah	84,35	85,13	100,92%	Sangat Berhasil

Dalam hal penggunaan sumber daya, terjadi efisiensi anggaran dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya penanganan fakir miskin	Persentase fakir miskin yang berdaya	157,10%	97,66%	1,61

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
2	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS	420,00%	98,35%	4,27
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	100,92%	98,32%	1,03

B. LANGKAH PERBAIKAN.

Langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna mencapai target kinerja sasaran pembangunan antara lain sebagai berikut :

1. Pendampingan/motivasi usaha/pemberdayaan dan bantuan akses pemasaran melalui sinergi OPD/stake holder terkait.
2. Peningkatan jejaring kerja sama dan sinergi antar OPD, Kab/Kota lain, Dinas Sosial Provinsi, Kementerian Sosial maupun pilar-pilar sosial dalam penanganan PMKS.
3. Peningkatan kapasitas PSKS melalui pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan kesejahteraan sosial.

Blitar, 15 Februari 2023
 KEPALA DINAS SOSIAL
 KOTA BLITAR



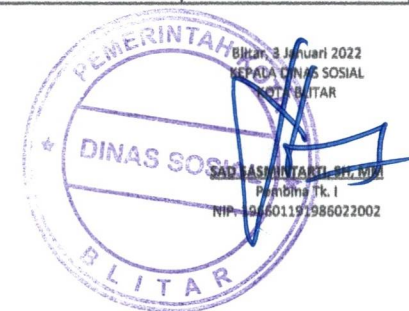
SAD SASMINTARTI, SH, MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 196601191986022002

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL KOTA BLITAR
TAHUN 2021 - 2026**

Lampiran I LKJIP

VISI : KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur dan Bermartabat
MISI : Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital

Tujuan					Sasaran					Cara Mencapai Tujuan dan sasaran		Ket
Uraian	Indikator	Formula Perhitungan	Kondisi Awal	Target	Uraian	Indikator	Formula Perhitungan	Kondisi Awal	Target	Strategi	Arah Kebijakan	
			2020	2022				2020	2022			
Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	Indeks Keparahan Kemiskinan	Data BPS	0,22	0,25	Meningkatnya penanganan fakir miskin	Persentase fakir miskin yang berdaya	$\frac{\text{Jumlah fakir miskin peserta pelatihan tahun n-1 yang bekerja/mulai merintis usaha}}{\text{Jumlah fakir miskin peserta pelatihan tahun n-1}} \times 100\%$	18,18%	10%	Peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan PMKS	Optimalisasi pelatihan dan pemenuhan kebutuhan dasar Pemberian program sosial ekonomi bagi warga miskin dan rentan miskin	
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase PMKS	$\frac{\text{Jumlah PMKS}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	7,71	7,48	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS	$\frac{(\text{Jumlah PMKS thn n-1}) - (\text{Jumlah PMKS thn n})}{\text{Jumlah PMKS thn n-1}} \times 100\%$	-7,31%	1,45%	Peningkatan upaya rehabilitasi dan jaminan sosial Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Peningkatan manajemen pengelola TMP	Peningkatan PMKS yang direhabilitasi, diberdayakan dan menerima jaminan sosial Peningkatan validasi data PMKS Peningkatan pendampingan pekerja sosial Peningkatan kapasitas PSKS Peningkatan sistem keamanan dan kebersihan TMP	
Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	A (83,94)	A (84,35)	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	A (83,94)	A (84,35)	Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah	Penyempurnaan penyusunan dan penerapan dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah	



PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUN 2022
DINAS SOSIAL KOTA BUKIT

Lampiran II LKJIP

Tujuan : 1. Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin
2. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat

Indikator : 1. Indeks Keparahan kemiskinan Target = 0,25
2. Persentase PMKS Target = 7,48%

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	84,35	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	6 doc	4.279.100
									Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan PD yang tersusun	11 dok	39.999.000
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	27 orang	3.353.565.766
									Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/ Semesteran)	12 dok	4.931.400
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah publikasi program/ kegiatan perangkat daerah	2 publikasi	130.043.600
										Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	3 even	
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 komp	13.874.800
									Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi (termasuk mebelair)	8 macam	109.425.795
										Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	4 macam	
									Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	35 jenis	30.091.450

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	350 dos	43.595.500
										Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	41 jenis	
									Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang tersedia	10 jenis	28.215.100
										Jumlah lembar penggandaan	38.060 lbr	
									Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia	12 bahan bacaan	8.100.000
									Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	50 rapat	190.510.550
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening yang terbayarkan	48 rek	87.401.724
									Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan	12 iuran	325.500.000
										Jumlah tenaga penunjang perkantoran yang tersedia (THL)	11 orang	
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	15 unit	81.105.300
										Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional terpelihara	3 unit	
									Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	6 jenis	27.048.300
									Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1 unit	166.610.000

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk mebelair)	2 jenis	14.711.800
Meningkatnya penanganan fakir miskin	Persentase fakir miskin yang berdaya	10%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	1,36%	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yatim/piatu yang memperoleh bantuan sosial	100 %	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yatim yang difasilitasi mendapatkan bantuan	592 orang	957.817.450
										Jumlah SLRT yang terfasilitasi	1 unit	
							Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	100 %	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan beras	10814 KPM	18.636.494.920
										Jumlah rumah tangga tidak mampu yang mendapatkan tambahan kesejahteraan	10814 KPM	
										Jumlah KPM Program Sembako/BSP yang difasilitasi mendapatkan bantuan sosial	6709 KPM	
							Persentase vervel data DTKS	100 %	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan verifikasi dan validasi DTKS	1 lap	251.343.100
										Jumlah laporan verifikasi dan validasi data peserta PBI JKN	1 lap	
				Persentase peningkatan PMKS terlatih	32%	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS terlatih	20 %	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah PMKS yang mengikuti pelatihan ketrampilan	120 orang	806.758.200
										Jumlah KUBE yang dibentuk/ dibina	1 KUBE	
										Jumlah peserta workshop kewirausahaan bagi fakir miskin	70 orang	
Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS	1,45%	Program Pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	100 %	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang mengikuti kegiatan peningkatan jejaring dan keterampilan guna peningkatan pelayanan PMKS	72 orang	1.486.569.172
										Jumlah pengurus/ anggota Orsos, relawan sosial dan PSKS yang menerima tambahan kesejahteraan	279 orang	
										Jumlah peringatan HUT PETA yang difasilitasi	1 even	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Jumlah perintis, janda perintis kemerdekaan yang menerima tali asih dan bingkisan lebaran	4 orang	
										Jumlah peringatan HKSN yang difasilitasi	1 even	
										Jumlah peringatan hari pahlawan yang difasilitasi	1 even	
										Jumlah peringatan HLUN yang difasilitasi	1 even	
										Jumlah Juru Kunci Makam dan modin kematian yang dibina	313 orang	
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	2,57%	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggung Disabilitas Terlarang, Anak Terlarang, Lanjut Usia Terlarang, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Anak Terlarang dan Lanjut Usia Terlarang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 %	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Anak yang membutuhkan pelayanan sosial dan Lanjut Usia Terlarang di Luar Panti Sosial yang mendapat bantuan permakanan	125 orang	333.866.900
									Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Anak yang membutuhkan pelayanan sosial dan Lanjut Usia Terlarang di Luar Panti Sosial yang mendapat bantuan sandang	10 org	4.902.400
									Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Anak yang membutuhkan pelayanan sosial dan Lanjut Usia Terlarang di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	40 org	110.256.800
									Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah adopsi anak yang difasilitasi	3 org	56.616.650
										Jumlah anak/orang terlarang yang mendapat pelayanan pemulangan ke daerah asal	30 org	
										Jumlah Anak yang membutuhkan pelayanan sosial dan Lanjut Usia Terlarang di Luar Panti Sosial yang mendapat pelayanan rujukan	10 org	
						Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyanggung Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyanggung disabilitas terlarang dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 %	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah dokumen pendataan/ verbal data PMKS	1 dok	43.323.900

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah psikotik yang bebas pasang	3 org	358.395.300
										Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza (termasuk penyandang disabilitas terlarut dan gepeng) di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	190 org	
										Jumlah klien hasil razia/penjaringan yang dibina	20 org	
									Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza (termasuk penyandang disabilitas terlarut, psikotik/eks psikotik dan Gepeng) di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan rujukan	68 org	84.702.850
			Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	100%	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial	100 %	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah ketersediaan Bufferstock untuk penanganan pasca bencana	655 paket	208.629.900 (15 paket utk korban bencana, 640 paket untuk isoman)
									Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah warga miskin yang sakit/mendapat musibah lainnya yang mendapatkan bantuan	50 orang	26.369.500
						Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana	81 %	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah peserta pembinaan anggota Tagana dan kegiatan ketanggap darurat	25 orang	233.990.450
										Jumlah peserta kegiatan Tagana masuk sekolah	150 orang	
										Jumlah Tagana yang mendapatkan tambahan kesejahteraan	25 orang	
										Jumlah peserta Diklat/Bimtek relawan kebencanaan	25 orang	
										Jumlah pemeliharaan/ pengadaan Sarpras lapangan untuk siaga bencana	2 unit	
										Jumlah peserta HUT Tagana	100 orang	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Jumlah kegiatan dapur umum lapangan	1 even	
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP dalam kondisi baik	100%	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara	100 %	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara	1 unit	85.535.160



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAD SASMINTARTI, SH, MM
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BLITAR
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. SANTOSO, M.Pd
Jabatan : WALIKOTA BLITAR
Selaku atasan langsung pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

WALIKOTA BLITAR



Blitar, 18 Oktober 2022
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA
BLITAR



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS SOSIAL KOTA BLITAR**

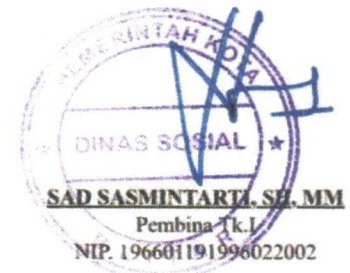
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS	1.45 (%)
2	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84.35 (nilai)
3	Meningkatnya penanganan fakir miskin	Persentase fakir miskin yang berdaya	10.00 (%)

No	PROGRAM	Anggaran	KET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.659.009.185,00	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.486.569.172,00	
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	992.064.800,00	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	20.652.404.670,00	
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	468.989.850,00	
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	85.535.160,00	
JUMLAH		28.344.572.837,00	

WALIKOTA BLITAR



Blitar, 18 Oktober 2022
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA
BLITAR



LAMPIRAN IV LKJIP
PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kota Blitar
Tahun : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya penanganan fakir miskin	Persentase Fakir Miskin yang Berdaya	Jumlah fakir miskin peserta pelatihan thn n-1 yang bekerja/mulai merintis usaha _____ x 100% Jumlah fakir miskin peserta pelatihan thn n-1	10	15,71	157,1%	Sebanyak 11 dari 70 orang yang mengikuti pelatihan keterampilan dan menerima Bansos peralatan usaha telah merintis usaha mandiri. Untuk meningkatkan kualitas hidupnya perlu dilakukan pendampingan/bimbingan usaha serta fasilitasi akses pemasaran usaha	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	20.652.404.670	20.169.171.952,00	97,66%	Sisa anggaran merupakan efisiensi dari pengadaan barang dan jasa guna mendukung pelaksanaan program kerja
2	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase Penurunan PMKS	(Jumlah PMKS thn n-1) - (Jumlah PMKS thn n) _____ 100% Jumlah PMKS thn n-1 Ket : N : Jmlh PMKS tahun ini N - 1 : Jmlh PMKS tahun kemarin	1,45	6,09	420%	Terjadi penurunan jumlah pmks/PPKS yang sangat signifikan namun upaya penanganan masalah sosial perlu terus ditingkatkan cakupannya mengingat karakteristik PMKS/PPKS cenderung memiliki mobilitas sosial yang sangat dinamis, sering berpindah-pindah sehingga jumlahnya selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu dan tidak akan pernah habis	Program pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Penanganan Bencana Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1.486.569.172 992.064.800 468.989.850 85.535.160,00	1.478.463.616 975.294.980 445.773.700 83.546.100,00	99,45% 98,31% 95,05% 97,67%	Sisa anggaran merupakan efisiensi dari pengadaan barang dan jasa guna mendukung pelaksanaan program kerja serta anggaran yang bersifat penyediaan dana sehingga serapannya berdasarkan kasus/layanan sosial yang bersifat insidental
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Dearah Kota Blitar	84,35	85,13	100,92%	Nilai Sakip mencapai target dan perlu diupayakan agar implementasi SAKIP belum menjadi kepedulian pada seluruh pegawai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4.659.009.185,00	4.580.924.555,08	98,32%	Sisa anggaran merupakan efisiensi dari pengadaan barang dan jasa serta anggaran yang bersifat penyediaan dana (gaji, jasa langgaran listrik, telepon, air dan internet) sehingga serapannya sesuai kebutuhan

